

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011-2015**

JURNAL



Ditulis Oleh:

Nama : Ayu Puspa Ningrum

Nomor Mahasiswa : 14313068

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2018**

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011-2015**

Ayu Puspa Ningrum

Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Email: ayupuspaa1305@gmail.com

ABSTRAK

Ketimpangan regional merupakan permasalahan klasik yang sudah lama terjadi dan harus dihadapi secara serius dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat dan mengetahui ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan variable PDRB Per Kapita, IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *cross section* dan *time series* yang biasanya disebut juga dengan data panel pada tahun 2011-2015. Metode analisis data panel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji signifikansi F, Hausman test dan uji T, Uji F dan R².

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan Indeks Williamson di Provinsi Kalimantan Barat masih tergolong rendah walaupun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Variabel PDRB Per Kapita berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Variabel IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan variable Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negative tetapi tidak signifikan.

Kata Kunci: *Indeks Williamson, PDRB Per Kapita, IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki 34 Provinsi, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk 255,461,700 juta jiwa pada tanggal 1 juli 2015. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia masih memiliki masalah dalam pemerataan pembangunan. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung meningkat dan stabil. Tetapi pertumbuhan yang tinggi ini tidak diseimbangi dengan pemerataan yang menyebabkan ketimpangan sosial antar daerah dan antar pedesaan. Seharusnya pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan pembangunan ekonomi yang merata.

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tidak selalu memberikan dampak positif terhadap pemerataan ekonomi, sebagian besar dampak yang diberikan oleh pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat yaitu semakin meningkatnya ketimpangan ekonomi yang terjadi. Fokus utama dari program pembangunan ekonomi yang terus meningkat, fokus lainnya dari pembangunan ekonomi yaitu menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan, pendapatan dan tingkat pengangguran (Todaro dan Smith, 2006)

Persoalan ketimpangan ekonomi sering terjadi pada negara yang sedang berkembang, ketimpangan ekonomi baik dari sisi ekonomi, pembangunan infrastruktur, fasilitas dan sarana publik bukan lagi hal baru. Persoalan ketimpangan sudah terjadi dari sejak awal pembangunan di Indonesia. Pemerintah sejak dulu sudah

banyak melakukan perbaikan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan, perbaikan yang dilakukan mulai dari perbaikan jalan untuk melancarkan distribusi antar daerah, memperluas aliran listrik sampai ke daerah pelosok agar masyarakat di daerah pelosok dapat merasakan aliran listrik juga dan memasang jaringan telepon serta jaringan internet di kecamatan-kecamatan agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan agar setiap informasi dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Tetapi usaha perbaikan infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah tetap masih belum mampu memperbaiki ketimpangan ekonomi yang terjadi. Ketimpangan dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan letak demografi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Dengan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan letak demografi yang dimiliki oleh setiap wilayah oleh karena itu tidak heran bilamana terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Salah satu tolak ukurnya adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita regional berdasarkan nilai PDRB. PDRB adalah nilai suatu barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh faktor produksi yang dihasilkan suatu daerah periode waktu tertentu. PDRB perkapita adalah PDRB atasharga konstan di bagi seluruh jumlah penduduk pertengahan tahun.

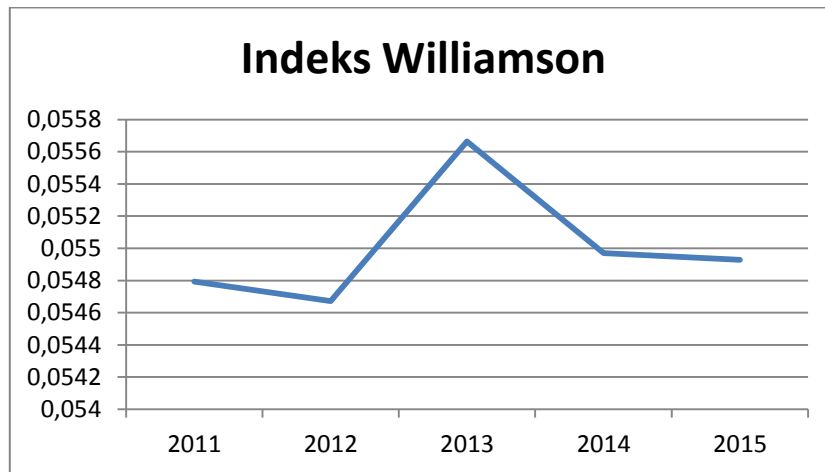
Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terbagi menjadi 14 Kabupaten yang memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan yang dimiliki antara lain perbedaan karakteristik sumber daya alam, sosial, dan ekonomi disetiap Kabupaten/Kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan ekonomi di masing-masing wilayah.

Dalam pembangunan ekonomi pasti mempunyai pro dan kontra dari masyarakat Kritik dan ketidakpuasaan yang timbul dalam proses pembangunan pada dasarnya muncul karena perkembangan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi kurang mampu menciptakan pemereratan pembangunan di wilayah tersebut, akibat dari tidak adanya pemerataan pembangunan mengakibatkan ketimpangan pendapatan semakin besar dan menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatkanya pengangguran, kurangnya meratanya sarana kesehatan dan pendidikan, kurangnya perumahan, kebutuhan pokok dan lain-lain.

Ketimpangan dapat ditunjukkan dengan melihat indeks ketimpangan williamson yang digunakan untuk memberikan gambaran kondisi dan perkembangan pembangunan daerah, dalam hal ini adalah Provinsi Kalimantan Barat dengan melihat tingkat pemerataan PDRB per kapita antar Kabupaten/Kota. Berikut ini indeks williamson Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011-2015.

Grafik 1.1

Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2015



Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa rata-rata ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2011-2015 mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan. Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 menunjukkan nilai indeks williamson sebesar 0.054793 dan naik menjadi 0.054671 pada tahun 2012. Begitu pula pada tahun-tahun berikutnya yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun.

Nilai Indeks Williamson di Provinsi Kalimantan Barat jika di perhatikan secara rata-rata tingkat PDRB per kapita antar wilayah memiliki tingkat ketimpangan yang relatif rendah. Hal ini diakibatkan karena pertumbuhan ekonomi di

masing-masing wilayah mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Ketimpangan dapat diakibatkan dari faktor perbedaan demografi salah satunya yaitu jumlah pengangguran terbuka yang ada di setiap wilayah yang ada di Kalimantan Barat. Tingginya angka pengangguran terbuka di setiap wilayah menunjukkan bahwa tidak meratanya pembangunan yang terjadi di setiap wilayah sehingga kurangnya tersedia lapangan pekerjaan yang dibutuhkan.

KAJIAN PUSTAKA

Sinaga (2010) melakukan penelitian tentang “ Analisis Ketimpangan Ekonomi antar Kabupaten/Kota dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya: Studi Kasus Provinsi Sumatera Selatan (2004-2007). Penelitian ini menggunakan metode data panel. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menjelaskan bahwa rasio angka harapan hidup dan rasio angka melek huruf berhubungan positif terhadap Produk Domestik Bruto per kapita, sedangkan hubungan PAD dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB per kapita tidak signifikan. Dengan menggunakan data PDRB per kapita tanpa migas menjelaskan bahwa rasio angka harapan hidup dan pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita, sedangkan hubungan pendapatan asli daerah dan rasio angka melek huruf terhadap PDRB per kapita tidak signifikan.

Mopangga (2011) melakukan penelitian tentang “ Analisa Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo”. Analisis yang digunakan adalah indeks wiliamson, indeks gini, *shift share* dan tipologi klassen dengan menggunakan regresi dan data panel. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia dan rasio belanja infrastruktur. Hasil analisa dengan menggunakan model indeks wiliamson, Produk Domestik Regional Bruto perkapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan di Provinsi Gorontalo. Sedangkan menggunakan indeks gini, PDRB per kapita menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Sedangkan variabel IPM yang terdapat pada indeks gini dan indeks williamson berpengaruh positif terhadap ketimpangan di Provinsi Gorontalo. Indeks Pembangunan Manusia, rasio belanja, infrastuktur dalam indeks gini dan indeks williamson berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Harun (2012) melakukan penelitian tentang “ Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur” dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat analisis Indeks Williamson dengan metode regresi data panel dengan *Random Effect Model*. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota DI Provinsi Jawa Timur.

Dhyatmka (2013) melakukan penelitian tentang “ Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten pasca pemekaran, dengan alat analisis Indeks Williamson, Tipologi Klassen”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat analisis Indeks Williamson dan Tipologi Klassen dengan metode regresi data panel. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten mengalami peningkatan. Berdasarkan tipologi kelas, kota yang termasuk daerah maju dan cepat berkembang adalah kota Tangerang dan Cilegon. Hasil dari analisis data panel dengan metode FEM, penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif, pengeluaran pemerintah (GE) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan dan sedangkan tingkat pengangguran (UE) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten pasca pemekaran.

Ginting (2014) melakukan penelitian tentang “ Analisis Ketimpangan Pembangunan di Indonesia”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan ketimpangan antar wilayah di Indonesia dan menganalisis pengaruh variabel PDRB per kapita, investasi dan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pada tahun 2004-2012 indeks Williamson bagian timur lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia bagian barat. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia antara Indonesia bagian barat dan bagian timur masih terjadi ketimpangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data panel dengan periode waktu 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah (1) PDRB Per Kapita; (2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Model persamaan dapat ditulis sebagai berikut:

Persamaan Secara Matematis:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Keterangan :

Y : Indeks Williamson (Persen)

X1 : PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)

X2 : Indeks Pembangunan Manusia (Persen)

X3 : Tingkat Pembangunan Manusia (Persen)

Dalam penelitian ini dilakukan uji *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Lalu, dilakukan juga uji seperti : Uji Chow Test, Uji Hausman. Setelah melakukan ketiga uji tersebut, peneliti juga melakukan pengujian statistik diantaranya yaitu koefisien determinasi (R^2), pengujian koefisien regresi secara bersama (Uji F statistik) dan pengujian koefisien secara individu (Uji T statistik).

HASIL DAN PEMBAHAN

Tujuan dari regresi ini adalah mengetahui pengaruh PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan di Provinsi Kalimantan Barat yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel.

1. Hasil Uji Signifikansi *Fixed Effect* dan *Common Effect* (*Chow Test*)

Uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan antara model estimasi *Common Effect* atau model estimasi *Fixed Effect*, dengan uji hipotesis:

- H_0 : memilih menggunakan model estimasi *Common Effect*.
- H_1 : Memilih menggunakan model estimasi *Fixed Effect*.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat *p-value* apabila signifikan ($<5\%$) maka model yang digunakan adalah *fixed effect*, apabila *p-value* tidak signifikan ($>5\%$) maka model yang digunakan adalah model estimasi *common effect*.

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	470.693681	(13,53)	0.0000

Sumber: Olahan data Eviews 9.0

Nilai distribusi statistik F test dari perhitungan menggunakan *Eviews 9.0* adalah sebesar 470.69368 dengan probabilitas 0.000 (lebih dari 5 %), sehingga statistik H_0 ditolak dan menerima H_1 , menurut hasil estimasi ini model yang tepat digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect Model*.

1. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan antara model estimasi *Fixed Effect* atau model estimasi *Random Effect*, dengan uji hipotesis :

- 1) H_0 : memilih menggunakan model estimasi *Random Effect*.
- 2) H_1 : memilih menggunakan model estimasi *Fixed Effect*.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat *p-value* apa bila signifikan (kurang dari 5%) maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect*, apabila *p-value* tidak signifikan (lebih dari 5 %) maka model yang digunakan adalah model estimasi *Random effect*.

Tabel 4.6. Hasil Uji signifikansi *Fixed Effect* dan *Random Effect* (*Hausman Test*)

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.231323	3	0.0000

Sumber: Olahan data Eviews 9.0

Nilai distribusi statistik *Chi Square test* dari perhitungan menggunakan *Eviews 9.0* adalah sebesar 23,2313 dengan probabilitas 0.0000 (lebih kecil 5 %), sehingga statistik H_0 ditolak dan menerima H_1 , menurut hasil estimasi ini model yang tepat digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect Model*.

PEMBAHASAN

1. Analisis Pengaruh PDRB terhadap ketimpangan Daerah

Hasil penelitian menemukan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini berarti semakin tinggi PDRB suatu daerah maka akan semakin meningkatkan ketimpangan daerah.

PDRB baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Kuncoro dan Mudrajat 2004). Hasil penelitian Mopangga (2011) menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan arti kata bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu daerah akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah lain maka akan menyebabkan ketimpangan pembangunan menjadi semakin tinggi, hal ini terjadi karena pada awal awal pembangunan pelaku ekonomi suka berinvestasi pada daerah - daerah yang relatif maju sebab infrastruktur lengkap, banyak tenaga kerja yang terlatih, peluang bisnis tersedia sehingga daerah yang tadinya juga sudah maju akan semakin maju dan keadaan ini akan mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi daerah maju.

2. Pengaruh IPM terhadap ketimpangan Daerah

Hasil penelitian menemukan IPM berpengaruh secara signifikan negatif terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini semakin besar IPM akan menurunkan ketimpangan yang terjadi antar daerah di propinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Mopangga (2011) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan daerah. Semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan Teori Human Capital yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosi, dkk (2013) bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

3. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbukaterhadap Ketimpangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini berarti besar kecilnya tingkat pengangguran belum dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi Kalimantan Barat.

Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang bekerja relatif cukup besar, namun sebagian besar penduduk di kota/kabupaten di Kalimantan Barat berstatus sebagai buruh dan karyawan swasta, yang gajinya relatif kecil sesuai dengan UMR yang ada, sehingga belum mampu menurunkan ketimpangan secara signifikan. Selain itu menurut Harun dan Maski (2013) menyatakan bahwa dari Dari segi tenaga kerja, perbedaan tingkat upah daerah maju dengan daerah tertinggal secara otomatis akan menimbulkan perpindahan tenaga kerja dari daerah tertinggal menuju ke daerah maju guna mencari pendapatan yang lebih tinggi, dengan demikian daerah yang tertinggal akan kehilangan tenaga kerjanya. Hal ini terbukti dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh banyak daerah maju guna membendung arus urbanisasi tidak berhasil. Dari segi keterampilan dan teknologi, pada daerah maju dengan begitu tinggi tingkat persaingan yang terjadi mendorong masyarakat di daerah tersebut untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan teknologi yang akan mendukung kegiatan ekonomi pelaku usaha sehingga akan lebih unggul dibandingkan dengan pelaku usaha yang lain, kemudian pelaku usaha yang tertinggal secara otomatis tidak ingin kalah dalam persaingan sehingga mencari cara agar dapat meningkatkan keterampilan dan teknologinya, dan kondisi ini berlangsung terus menerus. Sedangkan pada daerah yang tertinggal akan berlangsung kondisi yang stagnasi, dengan pola pikir yang tidak mau menerima perubahan bukan tidak mungkin daerah tersebut akan mengalami kemunduran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menemukan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini berarti semakin tinggi PDRB suatu daerah maka akan semakin meningkatkan ketimpangan daerah.
2. Hasil penelitian menemukan IPM berpengaruh negatif secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini berarti semakin tinggi IPM suatu daerah maka ketimpangan regional akan semakin menurun.
3. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini berarti besar kecilnya tingkat pengangguran daerah belum mampu meningkatkan ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat “*IPM Metode Baru Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015*”.
- Ginting, Ari. (2014) “*Analisis Ketimpangan Pembangunan di Indonesia*” Kajian Vol 20.
- Jonaidi, Ari. (2012) “*Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*” [Skripsi] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPPAMP YKPN, Yogyakarta
- Mopangga, Herwin. (2011) “*Analisis Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo tahun 2001-2008*” Jurnal Trikonomika, Vol. 10, nomor 1, hal 40-51. Universitas Negeri Gorontalo.
- Dhyatmika, Ketut Wahyu. (2013). “*Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran*”.Skripsi (dipublikasikan). Program Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah.
- Sinaga,(2010) “*Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota dan Faktor-faktor yang mempengaruhi: studi kasus Provinsi Sumatra selatan (2004-2007)*”[Skripsi] Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

